

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP / DPP UNAND 1994/1995
KONTRAK NO. 48/LP-UA/SPP/DPP-04/1994

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA
PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN SWASTA
DI KOTA PADANG

Oleh :

Hj. NURMI, SH.
Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 1994

BAB I

P R E N D A H U L U A N

I. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pemerintah telah meletakkan kerangka dasar yang merupakan konsep pemikiran untuk menumbuhkan dan mengembangkan peranan wanita dan perlindungan bagi wanita dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya.

Dari kerangka dasar kebijaksanaan Pemerintah untuk meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan bangsa maka dengan sendirinya peranan wanita merupakan sub sistem dari peranan para pelaku pembangunan yang pelakunya segenap bangsa dan Pemerintah Indonesia.

Pembangunan Indonesia pada hakikatnya adalah suatu proses menggerakkan seluruh pelaku pembangunan dan seluruh modal dasar pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan melalui rangkaian aktivitas atau tindakan yang terencana sebagai suatu proses kerjasama dengan memtaati ketentuan hukum dan nilai sosial yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah diutarakan dalam GBHN.

Konsep pembangunan dapat dipertajam dalam substansi pengertian sebagai; rangkaian aktivitas atau tindakan yang terencana dalam suatu proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rangkaian tindakan yang terencana untuk mencapai tujuan dalam interaksi sosial disebut sebagai peranan atau fungisional. Rangkaian aktivitas yang terencana dan berkelanjutan atau peranan dalam interaksi sosial terjadi dalam kerangka dasar yang mutlak harus ada, yakni:

- (a) harus ada pelaku dan harus jelas bentuk dan hubungan diantara para pelaku,
- (b) harus ada nilai-nilai normatif yang dapat membentuk dan mengikat pola perilaku dalam interaksi sosial
- (c) setiap interaksi sosial selalu terjadi dalam suatu kondisi dari suatu realitas yang ada, unsur ini disebut unsur kondisional yang kondusif.

Ketiga unsur tersebut merupakan kerangka atau struktur interaksi sosial yang membentuk perilaku atau peran dalam masyarakat.

Terbentuknya suatu masyarakat dalam hubungan orang-orang dengan sistem dan struktur kepemimpinan dilembagakan oleh nilai-nilai dan norma-norma sosial yang memiliki kekuatan normatif yang menjadi unsur pengikat hubungan sosial, dengan faktor kondisional sebagai fasilitatornya.

BAB III

HASIL PENELITIAN

I. RESPONDEN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 52 orang responden, terdiri dari berbagai tingkat pendidikan, tingkat umur dan jabatan dalam pekerjaan.

Penetapan responden dilakukan secara acak yang dapat ditemui dalam periode waktu selama penelitian.

Gambarkan umum responden dilihat dari berbagai sisi pandang antara lain tingkat pendidikan, tingkat umur, status perkawinan, jenis usaha, jabatan responden, dan status hukum badan usaha tempat responden bekerja, dapat mewakili obyek penelitian, sehingga pembahasan dan analisa yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang obyektif, setidak-tidak mendekati keadaan yang sebenarnya. Lebih lanjut, latar belakang responden dapat disusulkan sebagai berikut :

(a) Responden mewakili seluruh lapisan tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai tanaman perguruan tinggi dengan komposisi ;

- | | |
|-------------------------|----------|
| - tingkat Sekolah Dasar | 17,3 % ; |
| - Tingkat SLTP | 21,2 % ; |
| - tingkat SLTA | 36,5 % ; |

BAB III

BASIL PENELITIAN

1. RESPONDEN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 52 orang responden, terdiri dari berbagai tingkat pendidikan, tingkat umur dan jabatan dalam pekerjaan.

Penetapan responden dilakukan secara acak yang dapat ditemui dalam periode waktu selama penelitian.

Gambutan umum responden dilihat dari berbagai sisi paduan: antara lain tingkat pendidikan, tingkat umur, status perkawinan, jenis usaha, jabatan responden, dan status hukum badan usaha tempat responden bekerja, dapat mewakili obyek penelitian, sehingga pembahasan dan analisa yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang obyektif, setidak-tidak mendekati keadaan yang sebenarnya. Lebih lanjut latar belakang responden dapat disajikan sebagai berikut :

(a) Responden mewakili seluruh lapisan tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai tamatan perguruan tinggi dengan komposisi ;

- tingkat Sekolah Dasar	17,3 % ;
- Tingkat SLTP	21,2 % ;
- tingkat SLTA	36,5 % .

BAB III

KESIMPULAN

Dari temuan penelitian tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi wanita pekerja adalah apresiasi (penghargaan) terhadap sifat kodrati, harkat, martabat yang molekat pada wanita oleh suatu masyarakat.
2. Rata-rata tingkat pendidikan yang masih rendah dari tenaga kerja wanita merupakan faktor penyebab kurangnya pengetahuan mereka tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap sifat kodrati, harkat dan martabatnya.
3. Rendahnya rata-rata tingkat kesejahteraan keluarga merupakan faktor penyebab mereka terbiasa hidup dalam berbagai tekanan sehingga perlakuan yang diterimanya di tempat pekerjaan tidak lagi mereka permasalahkan.
4. Banyaknya kerja banyak yang dilakukan tidak secara tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief. 1981. Pembagian Kerja Secara Seksual. Gramedia, Jakarta.
- Ibnu Ahmad Dahri. 1992. Peranan Ganda Wanita Modern. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Kartasapoetra, G., R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra. 1992. Hukum Perburuan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ketetapan MPR RI No TT/HPR/1988 Lentang Garis-Garis Besar Haluan Reformasi, Jakarta.
- Noedjatmoko, Djunio S., Sriasmamtri. 1986. Hukum Hubungan Suami Istri Tahun 2000. Tiara Widana, Yogyakarta.
- Y.W. Sunindya, Rini Kidiyanti. 1988. Hukum PHK dan Pengorokan. Bina Aksara, Jakarta.
- Miwolo. 1991. Hukum Perjanjian Kerja. Rineka Cipta, Jakarta.